



PENETAPAN RANCANGAN AKHIR RENJA PD 2024



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan Penetapan Dokumen Rancangan Renja Kerja (Renja) PD Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

Penetapan Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan jangka waktu satu tahun PD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Strategis PD. Penetapan Renja PD memuat kebijakan program dan kegiatan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kami berharap Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di setiap Perangkat Daerah, Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan Pintu Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 serta diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong tercapainya Visi Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”.

Teluk Dalam, Agustus 2023

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Nias Selatan,

INTANSANI HARIA, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19730919 199303 2 007

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGAT DAERAH TAHUN LALU	 5
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.....	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	14
3.3. Program dan Kegiatan	15
 Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 16
 Bab V PENUTUP.....	 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 merupakan suatu dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk menjabarkan berbagai program dan rencana strategis khususnya lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan jangka waktu satu tahun PD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Strategis PD. Renja PD memuat kebijakan program dan kegiatan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di setiap Perangkat Daerah, Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor ... Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.
18. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor 5.1_48 tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, merupakan pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan PD untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.

3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan PD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja dengan kepemimpinan yang berbasis pada pelayanan, jujur dan sederhana.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Nias Selatan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan, adalah sebagai berikut :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- 1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5 Administrasi umum Perangkat Daerah
- 6 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 8 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

II Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1 Pembuatan peta potensi investasi Kab/Kota

III Program Promosi Penanaman Modal

- 1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

IV Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

V Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 1 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

VI Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 1 Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sampai dengan Tahun 2022 dan Perkiraan capaian tahun berjalan 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.1 dibawah ini.

BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
2. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan,
3. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi,
4. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara,
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan,
6. Penguatan Daya Saing Usaha,
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas,
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dari 8 Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ikut berperan dalam pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan baik secara Nasional, Provinsi dan sampai ke Kabupaten/kota. Adapun arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang sesuai dengan Visi, Misi dan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa *multiple interventions*. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan

dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut.

Peningkatan pendapatan masyarakat Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui :

1. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
3. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

Hal lain yang perlu dilakukan untuk Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah dengan melakukan Promosi penanaman modal. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri yang meliputi :

- a) Perumusan Strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Promosi.
- b) Penyediaan Sarana Promosi berdasarkan hasil perumusan strategi Promosi. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Promosi
- c) Kegiatan Promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi
- d) Penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal
- e) Koordinasi Promosi.

2. Penguatan Daya Saing Usaha,

Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan menciptakan peluang usaha seluasluasnya, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Dalam rangka penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM, maka diperlukan serangkaian kebijakan ekonomi makro, kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan daerah yang saling melengkapi, selaras dan sinergi dalam rangka memberdayakan UMKM.

Peningkatan Daya Saing Usaha dapat di dorong melakukan Kegiatan Usaha Masyarakat dengan mengurus Izin Usaha resmi dari Dinas Penanaman Modal dan PPTSP, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan atau mengurus Izin Usahnya. Dari hal tersebut, masyarakat dapat memperoleh suatu peluang usaha, dan dapat bersaing dengan bidang usaha lain.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan mempunyai prioritas pembangunan yang harus dicapai yaitu :

1. Mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan bebas KKN.
2. Menciptakan aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan.
3. Menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif.
4. Memberikan kepastian dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
6. Meningkatkan kualitas analisis, kajian dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan mempunyai Tujuan Rencana Kerja yaitu :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan berorientasi pada pelayanan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan.

Sedangkan Sasaran ialah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab.
2. Menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 mencakup 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- 1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4 Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
- 5 Administrasi umum Perangkat Daerah
- 6 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 8 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

II Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1 Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota
- 2 Pembuatan peta potensi investasi Kab/Kota

III Program Promosi Penanaman Modal

- 1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

IV Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

V Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 1 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

VI Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 1 Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota

Rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan untuk sumber dana APBD, APBD Provinsi dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.2

BAB V

PENUTUP

Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Nias Selatan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam kinerja terhadap Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tidak terlepas dari keterlibatan seluruh komponen masyarakat Nias Selatan oleh karena itu melalui kerja keras, kebersamaan, dan kesungguhan dapat mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang berbasis pada pelayanan, jujur dan sederhana.

Telukdalam, Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan,

INTANSANI HARIA, S.E., MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19730919 199303 2 007

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022
KABUPATEN NIAS SELATAN

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Renstra PD s/d
									Target Renja PD Tahun (2022)	Realisasi Renja PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		
1					2	3	5		6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan			100%	100%	100%	100%	
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	
2	18	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
2	18	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	18	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-	-	-	1 Dokumen	
2	18	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	18	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			-	-	-	-	
2	18	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-	-	-	-	
2	18	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	
2	18	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan
2	18	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	-	-	
2	18	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-	-	-	-	
2	18	1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-	-	-	-	
2	18	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

2	18	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		-	-	-	-	
2	18	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7 Laporan
2	18	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-	-	-	-	
2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD Perangkat Daerah yang diselesaikan		-	-	-	-	
2	18	1	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	
2	18	1	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	
2	18	1	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	
2	18	1	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	
2	18	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	
2	18	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	
2	18	1	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	
2	18	1	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-	-	-	-	
2	18	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-	
2	18	1	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-	-	-	
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	
2	18	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
2	18	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 700.000
2	18	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		-	-	-	-	
2	18	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Rp 4.128.000
2	18	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 1.711.700
2	18	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-	
2	18	1	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan/Material		-	-	-	-	
2	18	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-	-	-	
2	18	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan

2	18	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-	-	-	-	
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	-	-	-	
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%	
2	18	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	-	-	-	
2	18	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-	-	-	
2	18	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel			9 Unit	9 Unit	9 Unit	Rp 10.000.000	
2	18	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			-	-	-	-	
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-	-	
2	18	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-	-	
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia			14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	
2	18	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2	18	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2	18	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-	-	-	
2	18	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara			100 %	100 %	100 %	100 %	
2	18	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			4 Unit	4 Unit	4 Unit	Rp 40.000.000	
2	18	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-	-	-	
2	18	1	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-	-	-	-	
2	18	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-	-	
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-	-	
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan			-	-	-	100 %	
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif bidang penanaman modal			-	-	-	-	
2	18	2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			-	-	-	-	

2	18	2	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah			-	-	-	-	
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi daerah investasi			-	-	-	-	
2	18	2	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	
2	18	2	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			-	-	-	2 Dokumen	
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan			-	-	-	100 %	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang menjadi promosi penanaman modal			-	-	-	2 Dokumen	
2	18	3	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Data Strategi Promosi Penanaman Modal			-	-	-	1 Dokumen	
2	18	3	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (PMA/PMDN)			-	-	-	1 Dokumen	
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal			-	-	-	100 %	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin yang diterbitkan secara online			-	-	-	100 Orang	
2	18	4	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha			-	-	-	100 Orang	
2	18	4	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha			-	-	-	-	
2	18	4	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			-	-	-	-	
2	18	4	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha			-	-	-	-	
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			100 %	100 %	100 %	100 %	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMA dan PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi			216 Usaha	216 Usaha	216 Usaha	100 %	
2	18	5	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha			216 Kegiatan Usaha	216 Kegiatan Usaha	216 Kegiatan Usaha	195 Kegiatan Usaha	
2	18	5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha			216 Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	

2	18	5	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha</i>			216 Kegiatan Usaha	216 Kegiatan Usaha	216 Kegiatan Usaha	128 Kegiatan Usaha	
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten			-	-	-	-	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha yang membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			-	-	-	-	
2	18	6	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>			-	-	-	-	

Telukdalam, Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Nias Selatan,

INTANSANI HARIA, SE.,MM
PEMBINA TK.1
NIP. 19730919 199303 2 007

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KAB. NIAS SELATAN TAHUN 2024																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU						1.532.100.000,00							1.955.748.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.532.100.000,00							1.955.748.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						1.532.100.000,00							1.955.748.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	B Nilai/ Predikat 100 Persen			100 Persen B Nilai/ Predikat	778.048.000,00						B Nilai/ Predikat 100 Persen	907.748.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	-			7 Dok	21.500.000,00			-	-	-	-	26.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	-			19 Dok	16.688.000,00			-	-	-	-	18.188.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	7.188.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.188.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD Perangkat Daerah yang diselesaikan	-			100 Persen	3.900.000,00			-	-	-	-	4.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-			24 Orang	5.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	-			100 Persen	188.260.000,00			-	-	-	-	209.560.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.060.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.060.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	180.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	-			4 Unit	55.000.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	40.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	80.00 Perse n			50.00 Persen	195.000.000,00						80.00 Perse n	360.000.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi daerah investasi	-			1 Dok	195.000.000,00			-	-	-	-	360.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	80.00 Perse n			50.00 Persen	25.000.000,00						80.00 Perse n	60.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang menjadi promosi penanaman modal	-			6 Wilayah	25.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</i>	500.00 Dokumen			300.00 Dokumen	30.000.000,00						500.00 Dokumen	45.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah izin yang diterbitkan secara online</i>	-			300 Izin	30.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				500 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				100 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah PMA dan PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi</i>	42 Perusahaan			42 Perusahaan	502.052.000,00						42 Perusahaan	580.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah PMA dan PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi</i>	-			216 Usaha	502.052.000,00			-	-	-	-	580.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				250 Kegiatan Usaha.	100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				250 Pelaku Usaha	252.052.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		290.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				250 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten	Ada			Ada	2.000.000,00						Ada	3.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha yang membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-			100 Persen	2.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	JUMLAH							1.532.100.000,00							1.955.748.000,00	